

Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol. 20, No. 1, Juni 2024, Hal. 16-31
<https://doi.org/10.22146/bip.v19i1.7422>
ISSN 1693-7740 (Print), ISSN 2477-0361 (Online)
Tersedia online di <https://journal.ugm.ac.id/v3/BIP>

Kesiagaan menghadapi bencana di Perpustakaan Kementerian “X” di Jakarta

Arnola Dewinta Hasan¹, Yeni Budi Rachman²

^{1,2}Departemen Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia
Depok, Jawa Barat, 16424, Indonesia
e-mail: yeni.budi@ui.ac.id

Naskah diterima: 21 Maret 2023 , direvisi: 27 Juli 2023, disetujui: 24 Januari 2024

ABSTRAK

Pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapsiagaan bencana yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Kementerian “X” melalui standar kesiapsiagaan bencana oleh International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).

Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara dan studi dokumen.

Analisis Data. Hasil wawancara dan observasi direduksi dengan cara transkrip dan dilakukan koding. Data tersebut dianalisis berdasarkan lima aspek manajemen bencana IFLA didukung dengan berbagai literatur.

Hasil dan Pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari lima tahap kesiagaan menghadapi bencana IFLA, hampir seluruh tahapnya masih dilakukan secara sederhana dan belum komprehensif. Ancaman terbesar datang dari lingkungan internal yang mana salah satunya adalah kurangnya kesadaran SDM perpustakaan berpengaruh terhadap tidak adanya anggaran dan kegiatan kesiagaan menghadapi bencana yang optimal.

Kesimpulan. Berdasarkan temuan penelitian didapati bahwa Perpustakaan Kementerian “X” di Jakarta telah melakukan kesiagaan menghadapi bencana sesuai standar IFLA, namun masih berada pada tahap awal.

Kata kunci: kesiagaan menghadapi bencana; perpustakaan khusus; Perpustakaan Kementerian di Jakarta; Bencana; IFLA

ABSTRACT

Introduction. This study aims to identify disaster preparedness conducted by the Library of the Ministry of "X" through disaster preparedness standards by the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).

Data Collection Methods. Using a qualitative case study method, the data collection was carried out through observation, interviews, and document studies.

Data analysis. Data from interviews and observations were reduced using transcripts and coding. The data was analyzed based on the five aspects of disaster management by IFLA.

Results and Discussion. The results of the study show that among the five stages of IFLA disaster preparedness, almost all of the stages did not meet the standard and comprehensive manner. Based on the risk assessment, it is known that the biggest threat comes from the internal environment, one of them is library human resources. Lack of awareness of library human resources affects the absence of an optimal budget and disaster preparedness activities.

Conclusion. The Ministry Library "X" in Jakarta had carried out disaster preparedness according to IFLA standards, however, it is still in the early stage.

Keywords. disaster preparedness; special library; Ministry in Jakarta; Disaster; IFLA

A. PENDAHULUAN

Instansi pemerintah merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanan yang optimal, instansi pemerintah juga diwajibkan untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi pegawai dan masyarakat. Kewajiban bagi pemerintah untuk memiliki perpustakaan sebagai unit layanan pemberian informasi (Riyanti, 2017). Kementerian "X" di Jakarta merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengurus sektor kehutanan di Indonesia. Kementerian "X" di Jakarta memiliki sebuah perpustakaan khusus yang turut mengangkat koleksi kehutanan. Perpustakaan Kementerian "X" di Jakarta memiliki lebih dari 20 jenis koleksi bahan pustaka dengan estimasi jumlah koleksi mencapai 100.000 eksemplar yang terdiri lebih dari 1.000 judul. Menurut perpustakaan nasional untuk standar perpustakaan khusus (Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017), jumlah tersebut dapat dikategorikan cukup besar untuk sebuah perpustakaan khusus. Mengingat jumlah koleksi yang cukup besar, menjaga dan melindungi perpustakaan menjadi suatu kewajiban.

Ditinjau dari segi geografis, Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan atau memiliki potensi yang besar terhadap bencana alam karena terletak di zona cincin api atau *ring of fire* yaitu pertemuan tiga lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo Australia (Lakoro et al., 2018). Geoportal data bencana Indonesia milik BNPB menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat kurang lebih 3.383 kejadian bencana di Indonesia (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022). Menyadari ancaman bencana yang begitu besar, kesiagaan menghadapi bencana merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap lembaga atau organisasi di Indonesia termasuk Perpustakaan Kementerian "X" di Jakarta. *International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA) selaku badan perpustakaan internasional bahkan mengeluarkan standar yang memuat kesiagaan menghadapi bencana bagi perpustakaan dalam

Principles For The Care and Handling of Library Material pada tahun 1999 (IFLA, 2016). Standar tersebut menguraikan manajemen bencana menjadi lima yaitu *risk assessment, prevention, preparedness, response, dan recovery* yang setiap tahapannya tersusun atas beberapa butir kegiatan yang harus dimiliki atau dilakukan.

Penelitian dimulai pada bulan Juni tahun 2022, dilakukan survei awal terkait kondisi Perpustakaan Kementerian "X" di Jakarta dengan cara diskusi dan observasi. Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan beberapa pustakawan didapatkan informasi bahwa dalam dua dekade terakhir Perpustakaan Kementerian "X" di Jakarta pernah mengalami beberapa kali kejadian bencana. Salah satunya adalah sisi ruang koleksi utama perpustakaan pernah mengalami kebocoran yang cukup parah dan atap plafon ambruk sehingga menyebabkan kerusakan terhadap beberapa koleksi. Lebih lanjut, perpustakaan yang bersifat terbuka memungkinkan tingginya tingkat kunjungan dan frekuensi penggunaan koleksi sehingga koleksi perpustakaan rawan akan vandalisme.

Berdasarkan hasil penelusuran, dalam rentang waktu 10 tahun terakhir ditemukan cukup banyak penelitian terkait kesiagaan menghadapi bencana di perpustakaan di dalam maupun luar negeri. Beberapa diantaranya meliputi Kesiapsiagaan Perpustakaan dalam Menghadapi Bencana Kebakaran di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi (Pitri, 2019); *Disaster Management Practices in Selected University Libraries in Nigeria* (Rasaki, 2019); Kesiagaan Pustakawan dalam Menghadapi Bencana di Perpustakaan Institut Seni Indonesia Surakarta (Laksmiwati, 2019); *Disaster Preparedness in Sri Lankan University Libraries: Before COVID-19* (Wijayasundara, 2021) dan *Disaster Management in Central Library, Tezpur University: A Study* (Gohain et al., 2021). Namun di antara beberapa penelitian tersebut belum ada penelitian yang secara khusus berfokus kepada lima tahap manajemen bencana dari IFLA yang meliputi *risk assessment, prevention, preparedness, response, dan recovery*.

Berdasarkan dari pemaparan perlunya untuk melakukan penelitian terkait kesiagaan menghadapi bencana di Perpustakaan Kementerian “X” di Jakarta ditinjau dari teori lima tahap manajemen bencana IFLA. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan memunculkan adanya kebutuhan untuk melakukan penelitian kesiagaan menghadapi bencana di Perpustakaan Kementerian “X” di Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesiagaan menghadapi bencana yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Kementerian “X” di Jakarta. Selain dilandasi oleh urgensi melakukan kesiagaan menghadapi bencana, ditemukan juga bahwa penelitian kesiagaan menghadapi bencana di perpustakaan tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi baik bagi perpustakaan Kementerian “X” di Jakarta maupun perpustakaan lainnya untuk dapat mengadakan (jika belum diadakan) maupun meningkatkan kesiagaan menghadapi bencana yang sudah ada sehingga perpustakaan dapat mengurangi risiko bencana, khususnya bencana yang pernah dialami sebelumnya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Bencana

Wekke (2021) dalam bukunya *Mitigasi Bencana* menjelaskan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor manusia atau faktor alam, sehingga menimbulkan berbagai kerugian seperti timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis maupun kehilangan sumber daya lainnya. Pengertian bencana dalam konteks ilmu perpustakaan adalah berbagai kejadian yang mengancam keamanan manusia dan membahayakan atau mengakibatkan kerusakan pada bangunan, koleksi, isi, fasilitas dan layanan (Feather, 2016).

Kesiagaan Menghadapi Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, 2007,

Kesiagaan menghadapi bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan guna mengantisipasi bencana melalui sebuah pengorganisasian serta langkah tepat guna dan berdaya guna. Siklus penanggulangan bencana, umumnya terbagi ke dalam tiga periode yaitu: 1) Pra Bencana, upaya yang fokus pada kegiatan pencegahan bencana kategori kesiapsiagaan level medium; 2) Bencana, upaya yang dilakukan adalah tanggap darurat yang bersifat sangat penting; 3) Pasca Bencana, upaya perbaikan terhadap kerusakan akibat dampak bencana (Khambali, 2017).

Principles For The Care and Handling of Library Material (International Federation of Library Associations and Institutions, 1999) memuat informasi dasar mengenai tahapan manajemen bencana yang mudah untuk diimplementasikan dan didesain untuk perpustakaan dengan sedikit atau belum memiliki pengetahuan preservasi. IFLA menghadirkan lima tahapan manajemen bencana yang melingkupi kesiagaan menghadapi bencana dari pra hingga pasca bencana. Lebih lanjut, IFLA bahkan memisahkan tahapan analisis Risiko dari tahap pencegahan sehingga lebih terfokus. IFLA (1999) menguraikan kesiagaan menghadapi bencana menjadi lima tahapan yang meliputi:

- 1) *Risk Assessment* yaitu sebuah kegiatan analisis risiko terhadap bangunan dan koleksi perpustakaan yang terbagi menjadi 3 kegiatan yaitu analisis risiko internal, eksternal, dan evaluasi pencegahan;
- 2) *Prevention* yaitu kegiatan pencegahan yang dapat dilakukan oleh perpustakaan mulai dari preservasi dan konservasi perpustakaan hingga persiapan dan pemeriksaan peralatan kebencanaan;
- 3) *Preparedness* yaitu kegiatan membuat atau mengembangkan rencana tertulis yang terdiri dari prosedur darurat, tanggap bencana, daftar persediaan darurat, daftar prioritas penyelamatan dan hingga pemulihan.
- 4) *Response* yaitu prosedur evakuasi yang harus dilakukan saat terjadinya bencana;
- 5) *Recovery* yaitu kegiatan pemulihan segala bentuk kerusakan pasca bencana yang

dikelompokkan ke dalam 6 kegiatan yaitu penentuan daftar prioritas, pengembangan program konservasi untuk kerusakan besar, pemilahan barang untuk diganti/diperbaiki, rehabilitasi lokasi, hingga pengembangan perencanaan antisipasi bencana masa depan.

Selain itu, *Principles For The Care and Handling of Library Material* oleh IFLA (1999) juga memuat informasi mengenai pencahayaan bagi perpustakaan. Diinformasikan bahwa pada dasarnya tingkat pencahayaan perpustakaan tergantung kepada spesialis dan *Fluorescent lamps* merupakan jenis lampu yang banyak digunakan oleh perpustakaan karena tidak menghasilkan panas yang berlebihan namun tetap memberikan pencahayaan yang cukup.

Faktor Internal dan Eksternal Bencana

Faktor penyebab bencana dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bencana merupakan berbagai penyebab bencana yang berasal dari dalam lingkungan atau koleksi perpustakaan seperti pencahayaan, temperatur, udara, serangga, kelembaban relatif, jasad renik dan binatang pengerat sedangkan faktor eksternal bencana merupakan berbagai faktor yang berasal dari luar perpustakaan seperti lokasi geografis bangunan, keamanan, konstruksi bangunan (gedung), hingga ancaman bencana alam (Rachman & Rachman, 2015). Faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, cahaya, jamur, serangga, hama, polutan atmosfer dan polutan partikulat seluruhnya juga berpotensi besar dalam kerusakan koleksi perpustakaan karena dapat menyebabkan reaksi degradasi bagi koleksi. Sifat kimia, mekanik, dan biologis dari reaksi ini dapat bervariasi untuk setiap bahan koleksi yang berbeda. Selain itu, tingkat suhu yang ideal bagi perpustakaan dengan material koleksi berbahan dasar kertas yaitu umumnya dapat disesuaikan dengan kenyamanan manusia yaitu sekitar 20-22°C dengan tingkat kelembaban relatif yang ideal berkisar 55-65% (International Federation of Library Associations and Institutions, 1999).

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif adalah metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi, dan memahami suatu makna yang bagi individu atau suatu kelompok yang dianggap sebagai permasalahan sosial atau kemanusiaan (Creswell & Creswell, 2018). Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder didapatkan dari studi dokumen dan literatur guna mendukung data primer yang telah didapatkan. Informan dalam wawancara ini terdiri dari tujuh orang informan dengan kriteria yang ditetapkan yaitu memiliki peran di Perpustakaan "X" dan pernah mengalami kejadian bencana di Perpustakaan "X" baik alam maupun non alam. Tujuh informan tersebut terdiri dari seorang penanggung jawab perpustakaan, dan enam pustakawan Perpustakaan Kementerian "X" di Jakarta (lihat tabel 1). Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi tak berstruktur dengan tujuan agar penulis dapat melakukan observasi secara bebas dan dapat mencatat sesuatu yang menarik lalu dianalisis dan ditarik kesimpulan (Wanto, 2018). Objek penelitian ini adalah kesiagaan menghadapi bencana yang terdapat pada Perpustakaan Kementerian "X".

Seluruh data yang diperoleh akan diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif milik Miles, Huberman & Saldana yang terdiri dari reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan (Miles *et al.*, 2014). Analisis data pada penelitian ini dimulai dengan tahap reduksi data berupa penyederhanaan, penggolongan dan eliminasi data yang tidak diperlukan pada hasil wawancara dan observasi dengan cara membuat transkrip wawancara dan observasi. Setelah reduksi data dilakukan, data tersebut dianalisis berdasarkan lima aspek manajemen bencana IFLA (1999) didukung dengan berbagai literatur. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mengambil inti hasil penelitian dan menghubungkan kelompok data

yang memiliki keterkaitan sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang menjawab masalah penelitian. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk pemaparan deskriptif (lihat gambar 1).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perpustakaan Kementerian "X" memiliki lima ruang koleksi yaitu ruang koleksi utama, ruang koleksi multimedia, ruang koleksi peta, ruang koleksi mikrofis dan ruang koleksi tandon. Koleksi-koleksi yang ada cukup tertata dengan rapi di rak dan lemari besi untuk peta. Kebersihan, sirkulasi udara, dan pencahayaan ruangan memadai. Pada beberapa ruangan tersebut, terdapat atap plafon yang berlubang dan perlu perbaikan. Kondisi dari ruang mikrofis dan ruang tandon tidak sebaik dari ruangan koleksi lainnya. Ruang mikrofis sudah beralih fungsi menjadi gudang peralatan dan ruang pantau CCTV sehingga kondisinya disekitarnya cukup berantakan. Meskipun demikian kebersihan di ruang mikrofis masih cukup terjaga. Ruang koleksi tandon memiliki kondisi yang paling memprihatinkan, selain menjadi gudang, kebersihan ruangan tandon tidak terjaga, ruangan kotor dan koleksi yang dijajarkan pada rak sebagian besar banyak yang ditemukan berdebu dan rusak. Bahkan terdapat beberapa koleksi tandon yang hampir habis dimakan oleh rayap. Ditinjau dari aspek pencahayaan, selaras dengan IFLA (1999), Perpustakaan Kementerian "X" di Jakarta menggunakan *fluorescent lamps* untuk hampir seluruh ruangan yang ada karena *fluorescent lamps* dapat memberikan pencahayaan yang cukup tanpa menghasilkan panas yang berlebihan. Lebih daripada itu dari segi *color quality, color distribution*, atau *cost-effectiveness, fluorescent lamps* unggul dari yang lainnya. Secara umum, *Fluorescent lamps* modern merupakan produk pencahayaan paling hemat energi dan hemat biaya (Tan et al., 2015).

Dalam upaya menjaga kestabilan suhu ruang agar koleksi tetap terjaga, perpustakaan khusus menggunakan *air conditioner* (AC). Tingkat temperatur suhu yang dimiliki hampir seluruhnya sama kecuali ruang koleksi peta dan mikrofis. Pada ruang peta dan mikrofis, suhu ruangan sengaja dibuat lebih rendah karena

koleksi peta yang ada sudah cukup tua dan rapuh sedangkan untuk koleksi mikrofis dilakukan agar kualitas dari koleksi mikrofis tetap terjaga. Oleh karena itu, terdapat sedikit perbedaan tingkat suhu dan kelembaban relatif. Tingkat temperatur suhu secara umum di perpustakaan yaitu sebesar 22°C dengan kelembaban relatif sebesar 52%. Tingkat temperatur suhu di ruang peta dan mikrofis yaitu sebesar 19°C dengan kelembaban relatif sebesar 56%. Mengacu kepada IFLA (1999), suhu dan kelembaban relatif yang ideal adalah sekitar 20° – 22° C dengan tingkat kelembaban relatif berkisar 55% – 65% sehingga suhu dan kelembaban relatif yang dimiliki dinilai sudah cukup baik. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diperoleh kesimpulan sementara bahwa perpustakaan tempat mereka bekerja cukup rentan terhadap bencana (lihat tabel 2).

Berikut merupakan hasil analisis yang dilakukan berdasarkan lima tahap IFLA (*risk assessment, prevention, preparedness, response, dan recovery*) terhadap pelaksanaan kesiagaan menghadapi bencana di Perpustakaan Kementerian "X" di Jakarta.

1. Risk Assessment (Analisis Risiko)

Analisis risiko merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam kesiagaan menghadapi bencana. Melakukan analisis risiko dapat membantu instansi untuk melakukan pencegahan yang tepat karena mengetahui jenis potensi bencana. Kegiatan analisis risiko terdiri dari tiga aspek kegiatan yaitu identifikasi ancaman bahaya dari lingkungan internal, eksternal dan evaluasi terhadap serangkaian pencegahan yang sudah ada (IFLA, 1999). Ditinjau dari aspek analisis risiko, diperoleh bahwa Perpustakaan Kementerian "X" telah melakukan rangkaian kegiatan analisis risiko. Pustakawan dapat mengidentifikasi risiko bencana internal, eksternal dan dapat melakukan evaluasi terhadap pencegahan yang telah dimiliki. Namun, demikian analisis risiko masih sederhana dan belum dilakukan secara terstruktur. Saat wawancara, informan mengonfirmasi bahwa mereka mengetahui risiko-risiko yang sekiranya dimiliki oleh

perpustakaan, namun mereka menyatakan bahwa hingga saat ini belum memiliki catatan analisis risiko secara tertulis. Berbeda dengan tahapan lainnya yang sudah dipersiapkan secara terstruktur yaitu adanya bukti fisik kegiatan yang sistematis, analisis risiko justru hampir-hampir tidak disadari keberadaannya oleh pustakawan Perpustakaan Kementerian “X” di Jakarta. Menurut Danil (2021), bencana yang belum pasti terjadi dan tidak diketahui kapan terjadinya merupakan salah satu faktor kurangnya perhatian pihak-pihak terkait urgensi pengelolaan bencana. Terlebih, dalam lima tahun terakhir tidak ada bencana maupun insiden besar yang terjadi di Perpustakaan Kementerian “X” sehingga pustakawan tidak merasakan adanya urgensi dalam melakukan analisis risiko dalam bentuk tertulis.

Mengacu kepada analisis risiko IFLA (1999), penulis mencoba melakukan analisis terhadap beberapa risiko bencana yang diidentifikasi oleh pustakawan. Berdasarkan analisis ancaman lingkungan eksternal yang dilakukan didapati bahwa Perpustakaan Kementerian “X” memiliki beberapa ancaman seperti letak perpustakaan yang berada pada kawasan padat, rawan aksi demonstrasi, kebakaran serta vandalisme. Letak perpustakaan yang berada di wilayah, Jakarta Pusat, berdasarkan peta kerentanan dari aspek bangunan, kepadatan populasi, GDRB (*Gross Domestic Regional Bruto*) dan data penggunaan lahan, memiliki tingkat kerentanan paling tinggi di wilayah DKI Jakarta (Azmiyati & Poernomo, 2019). Fakta tersebut menunjukkan bahwa Perpustakaan Kementerian “X” memiliki potensi bencana yang cukup besar dari kawasan di sekitarnya. Sebagaimana aksi demonstrasi yang turut mengancam perpustakaan karena menimbulkan keresahan dan dilakukan penutupan perpustakaan. Kemudian, bencana lain seperti kebakaran merupakan ancaman yang paling merugikan bagi perpustakaan karena mengakibatkan kerusakan yang cukup parah bagi koleksi dibanding dengan bencana lainnya (Haryanto, 2015). Vandalisme (84,9%) dan kebakaran (82,2%) menduduki posisi teratas untuk bencana yang paling familiar bagi perpustakaan (Rasaki, 2019). Untuk hal ini, perpustakaan menyadari bahwa mereka

memiliki kedua ancaman tersebut sebagaimana penuturan kedua informan berikut.

“Kebakaran pasti ada potensi ya karena gedung dengan sistem besar.” (Abimanyu)
“...Terus karena kita gak dampingin terus-terusan jadi vandalisme pasti ada.” (Dewi Gandawati)

Kebakaran mudah terjadi karena gedung perpustakaan merupakan sebuah sistem besar yang terdiri dari berbagai material yang mudah terbakar. Kemudian, pendampingan yang tidak selalu dilakukan membuat perpustakaan menyadari bahwa vandalisme tidak dapat dihindari. Sejauh ini, perpustakaan telah melakukan pencegahan seperti mengadakan peralatan kebakaran, menempel stiker larangan kebakaran, menyediakan loker barang dan melakukan pengawasan. Namun, upaya-upaya tersebut masih belum optimal sebab beberapa loker ditemukan macet dan petugas perpustakaan tidak dapat menggunakan peralatan kebakaran. Risiko ancaman eksternal lainnya masih cukup terkendali sebab perpustakaan cukup berjarak dengan beberapa sektor umum tersebut. Di samping itu, dari aspek keamanan perpustakaan juga sangat terlindungi karena ada pembatas pagar, penjagaan keamanan selama 24 jam oleh satpam dan pencahayaan yang baik. Polusi juga dapat menjadi sebuah ancaman terlebih Jakarta memiliki tingkat polusi yang cukup tinggi (IQAir, 2022), meskipun demikian polusi tidak begitu mengancam perpustakaan karena kebersihan di perpustakaan selalu terjamin. Adanya petugas kebersihan, *Air conditioner* (AC) dan lingkungan dari kementerian yang didominasi oleh pepohonan merupakan filter terbaik bagi debu dan polutan.

Beralih ke analisis ancaman lingkungan internal didapati bahwa Perpustakaan Kementerian “X” memiliki struktur bangunan yang cukup kokoh karena terdiri dari beton berlapis keramik serta berada di lantai dua. Hal tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan cukup aman dari bencana banjir dan dapat menahan besarnya beban perpustakaan yang terus bertambah. Namun, hal tersebut tidak

didukung oleh struktur atap yang baik. Atap ditemukan berlubang pada beberapa bagian sehingga kerap mengalami kebocoran dan menjadi jalur tikus. Atap yang berlubang sangat riskan, terlebih tikus sangat menyukai perpustakaan karena buku dapat menjadi sumber makanan dan sarang sehingga sulit diberantas (Djamarin, 2015). Oleh sebab itu, sudah seharusnya perpustakaan khusus menjadikan persoalan atap tersebut sebagai prioritas perbaikan. Berikut pernyataan informan mengenai atap berlubang.

“Kalo dari segi bangunan ya kalo untuk sementara ya aman...Ini juga bolong-bolong atapnya kan banyak ya suka bocor juga di pojok-pojok...terus suka ada tikus dari plafon-plafon yang bolong.” (Dewi Srikandi)

Koleksi merupakan salah satu unsur terpenting dalam sistem perpustakaan (Djamarin, 2015). Sebagian besar koleksi disimpan jauh dari ruang atau fasilitas yang mengancam keselamatan seperti pipa ledeng, instalasi listrik, dapur, dan sebagainya (IFLA,1999). Namun di dekat ruang peta dan mikrofis ditemukan instalasi listrik yang dapat mengancam keselamatan koleksi. Oleh karena itu, perpustakaan harus rutin melakukan pengecekan berkala untuk memastikan keamanan koleksi. Apabila ditemukan tanda-tanda bahaya, perpustakaan harus mengambil langkah yang tepat untuk keselamatan koleksi. Selain itu, juga ditemukan beberapa jenis koleksi yang mudah rusak karena faktor usia, teknologi, dan perlakuannya, berikut merupakan daftar koleksi yang terancam bahaya (lihat tabel 3). Berdasarkan tabel 3, sudah seharusnya tiga koleksi tersebut mendapat perhatian lebih oleh Perpustakaan Kementerian “X”. Penggunaan dari koleksi reprografi harus dibatasi demi mengurangi kerusakan akibat kontak fisik. Lebih lanjut, ketiga koleksi yang bersifat terbatas sudah seharusnya dialihmediakan untuk pemanfaatan yang lebih baik.

Mengevaluasi beberapa rangkaian pencegahan yang telah dimiliki Perpustakaan

Kementerian “X” didapati bahwa selama ini perpustakaan telah melakukan beberapa rangkaian pencegahan seperti pencadangan data komputer secara rutin, penduplikasian arsip dan mengadakan peralatan bencana. Meskipun duplikasi arsip telah dilakukan namun hingga kini perpustakaan belum memiliki salinannya di luar perpustakaan. Padahal penting bagi perpustakaan memiliki cadangan data di luar perpustakaan sebagai cadangan jika terjadi bencana. Pencadangan data menjadikan data yang telah hilang, tetap dapat dimiliki, sehingga perpustakaan dapat kembali melakukan manajemen koleksi (Setiawan & Mas'ud, 2019). Kemudian, ditinjau dari peralatan bencana yang dimiliki, perpustakaan khusus diketahui hanya berfokus kepada bencana kebakaran karena sebagian besar peralatannya diperuntukan bagi bencana kebakaran. Saat melangsungkan wawancara, salah satu staf secara spontan mengatakan bahwa pada dasarnya peralatan kebakaran merupakan standar untuk mendirikan gedung. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya perpustakaan hanya bergantung pada peralatan bencana yang memang disediakan pengelola gedung.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa staf di perpustakaan belum pernah diberikan edukasi maupun pelatihan kebencanaan (baik prosedur maupun tanggap darurat). Sejauh ini pustakawan hanya mengandalkan satpam karena sejak awal satpam telah diberikan pelatihan bencana, serta memiliki pedoman bencana khusus. Padahal SNI ISO 21110:2019 menyatakan bahwa staf harus mendapatkan pelatihan mengenai penggunaan alat pemadam kebakaran yang tepat dan mengetahui prosedur bencana sehingga dapat membantu pengarahannya. Pustakawan memiliki andil yang besar dalam penyelamatan aset perpustakaan karena lebih menguasai area perpustakaan daripada satpam sehingga penyelamatan dapat lebih efektif. Meskipun demikian, berdasarkan informasi yang diperoleh, Kementerian “X” di Jakarta pernah mengadakan pelatihan bencana namun sudah cukup lama dan tidak semua pustakawan mengikuti pelatihan tersebut. Pelatihan tersebut terakhir dilakukan sebelum tahun 2000

sehingga tidak menjamin perwakilan yang dikirim masih mengingat ilmu praktis dari pelatihan yang diberikan dan staf yang baru bergabung beberapa tahun terakhir sudah dipastikan tidak pernah mengikutinya. Sebagaimana pernyataan wawancara berikut.

“adanya dulu pelatihan untuk kebakaran secara umum aja dari institusi A yang bekerja sama dengan pemadam kebakaran. Itu pun sudah sangat lama sebelum tahun 2000 dan gak rutin, gak dijadwalkan. Pelatihannya seputar bagaimana menyelamatkan diri dan barang-barang penting kaya barang-barang apa aja yang harus diselamatin” (Dewi Srikandi).

Perpustakaan khusus juga diketahui tidak memiliki sistem keamanan gedung yang terhubung secara otomatis kepada pihak darurat seperti kantor polisi, pemadam kebakaran dan sebagainya. Meskipun demikian, perpustakaan menyatakan bahwa di dekat lingkungan kementerian X terdapat unit pemadam kebakaran sehingga mudah dijangkau bila terjadi kebakaran.

2. *Prevention* (Pencegahan)

Pencegahan merupakan suatu upaya yang terdiri dari serangkaian kegiatan antisipasi yang dilakukan dalam rangka untuk mengurangi dampak bencana. Menurut IFLA (1999), pencegahan yang dapat dilakukan oleh perpustakaan meliputi preservasi dan konservasi, persiapan peralatan kebencanaan, memastikan pemeriksaan rutin terhadap peralatan tersebut, dan pencegahan lainnya. Meskipun hanya melakukan analisis risiko sederhana, tindak pencegahan yang dilakukan oleh Perpustakaan Kementerian “X” meliputi pengadaan peralatan bencana, pemeriksaan rutin peralatan bencana hingga preservasi dan konservasi koleksi.

Sebagian besar peralatan bencana yang dimiliki Perpustakaan Kementerian “X” adalah peralatan kebakaran. Fakta tersebut membuat pustakawan memberikan perhatian lebih kepada bencana kebakaran daripada bencana lainnya. Pada dasarnya hal tersebut tidak menjadi

masalah karena memang kebakaran merupakan bencana yang sangat merugikan bagi perpustakaan. Namun, sudah seharusnya perpustakaan juga melengkapi peralatan bencana lainnya dan melakukan sosialisasi rutin mengenai fungsi dan cara penggunaan alat-alat kebencanaan. Peralatan bencana diantaranya meliputi peralatan kesehatan, peralatan komunikasi, peralatan peringatan dini, peralatan teknik dan sebagainya (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI Nomor 11 Tahun 2011, 2011). Sejauh ini, jenis peralatan bencana yang dimiliki perpustakaan khusus tergolong ke dalam peralatan peringatan dini dan peralatan teknik, berikut merupakan daftar peralatan bencana yang dimiliki.

Pemeriksaan rutin pada Perpustakaan Kementerian “X” peralatan sejauh ini telah dilakukan. Namun, tidak diketahui jadwal rutin untuk masing-masing pemeriksaan peralatan. Pemeriksaan peralatan bencana dilakukan secara tentatif baik di hari kerja maupun hari libur. Lalu, pemeriksaan peralatan juga terkadang tidak diberitahukan oleh biro umum sehingga pustakawan tidak mengetahuinya. Sebagaimana penuturan beberapa informan berikut yang pernah melihat kegiatan pemeriksaan peralatan.

“Kalau yang APAR itu ada pemeriksaan. Tahun kemarin apa kalau gak salah, baru kok. Mungkin kalo pemeriksaan yang lain kaya pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan listrik dilakuinnya di hari libur kaya sabtu atau minggu ada suratnya gitu.” (Arjuna)

“Gak tau (pemeriksaan rutin kapan dilakukan), tapi tiba-tiba suka ada datang gitu tim pemeriksa. Saya pernah ngalamin gitu makanya saya tau. Ada yang periksa-periksa tabung APAR, deteksi asap gitu.” (Dewi Srikandi)

Hal tersebut menunjukkan bahwa pustakawan tidak dilibatkan dalam perawatan peralatan bencana. Padahal pustakawan merupakan pihak yang dapat memantau keadaan peralatan tersebut secara aktual. Oleh karena itu, penting bagi pustakawan untuk

mengetahuinya sehingga pustakawan dapat mengontrol keterbaharuan dan fungsi dari peralatan yang ada.

Selain itu, identifikasi koleksi penting dan vital merupakan bagian dari tindak pencegahan yang harus dimiliki. Perpustakaan harus dapat mengidentifikasi koleksi penting dan vital yang dimilikinya guna membuat daftar atau menentukan prioritas penyelamatan maupun perbaikan koleksi dari bencana. Ditinjau dari kemampuan mengidentifikasi koleksi penting dan vital, diperoleh bahwa sebagian besar pustakawan merasa kesulitan dalam mengkategorikan koleksi penting dan vital yang mereka miliki. Hal tersebut karena mereka merasa bahwa seluruh koleksi yang dimiliki merupakan koleksi khusus dengan jumlah yang cukup terbatas.

Pada dasarnya tidak semua koleksi perpustakaan membutuhkan perawatan khusus, tetapi semua koleksi perpustakaan harus dilindungi dari berbagai ancaman bencana (IFLA, 1999). Perpustakaan Kementerian “X” juga telah melakukan beberapa perawatan koleksi meliputi fumigasi, sampul koleksi, perbaikan koleksi, pemberian naftalen/kamper, menjaga suhu ruangan tetap rendah, menjaga pencahayaan dan kebersihan. Di antara semua kegiatan perawatan tersebut fumigasi sudah lama tidak dilakukan. Sebagaimana penuturan informan berikut.

“Kalau dulu sebelum gabung dengan kementerian kita ada fumigasi koleksi. Itu biasanya kita anggarkan setiap tahun, minimal setahun sekali. Semenjak bergabung ke kementerian ini anggarannya belum ada yang untuk fumigasi. Jadi kalau sekarang perawatannya lebih ke kamper/kapur barus aja untuk menghindari kutu buku, rayap gitu. Terakhir kali fumigasi sebelum gabung kementerian sekitar tahun 2012-2013. Padahal paling tidak setahun sampai tiga tahun kan fumigasi.” (Dewi Srikandi)

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa pustakawan menyadari pentingnya fumigasi dalam upaya perawatan. Faktor hama

seperti rayap dan kutu buku menjadi alasan utama pentingnya melakukan fumigasi. Namun, fumigasi sudah lama tidak dilakukan sejak perpustakaan yang semula merupakan Yayasan bergabung menjadi Perpustakaan Kementerian “X”. Sementara, kegiatan pelestarian koleksi yang dilakukan meliputi kegiatan penjilidan ulang koleksi yang kondisinya kurang baik dan alih media (mikrofilm dan scan). Kegiatan pelestarian yang dilakukan tergolong masih rendah karena baru dilakukan terhadap beberapa koleksi yang mana di antaranya hanya sebatas cover buku. Untuk itu, preservasi dan konservasi di Perpustakaan Kementerian “X” dirasa masih kurang dan harus lebih ditingkatkan mengingat besarnya jumlah koleksi yang ada.

Ketika terjadinya bencana, keselamatan dan kesehatan dari sumber daya manusia juga menjadi faktor yang harus diperhatikan oleh perpustakaan. Terlebih saat ini terdapat pandemi COVID-19. Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Bencana, COVID-19 termasuk ke dalam kategori bencana non alam berupa wabah penyakit (*communicable disease*) yang membutuhkan desain sistem ketahanan bencana (*disaster resilience*) yang bersifat menyeluruh. Menyadari itu, Perpustakaan Kementerian X” melakukan pencegahan dengan cara meningkatkan protokol kesehatan. Sejauh ini, perpustakaan belum memiliki alat pertolongan pertama pada kecelakaan seperti oksigen, obat-obatan dan lainnya. Sebagaimana penuturan dari informan berikut.

“P3K kita gak punya, tapi ada klinik. Ambulans juga tersedia.” (Dewi Sumbadra)

Meskipun demikian, Perpustakaan Kementerian “X” tetap merasa aman karena Kementerian memiliki klinik dan ambulance yang siap siaga. Selain itu, SDM perpustakaan juga memiliki asuransi kesehatan BPJS.

3. **Preparedness (Kesiapsiagaan)**

Preparedness/kesiapsiagaan merupakan kegiatan penyusunan rencana maupun pedoman

bencana dan memastikan pencegahan yang dilakukan sudah dipersiapkan, diperiksa, dan diperbaharui dengan baik, termasuk pembentukan tim bencana dan keuangan (IFLA,1999). Pedoman maupun rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat tertulis pada Perpustakaan Kementerian “X” sejauh ini belum dimiliki maupun dikembangkan. Padahal wajib bagi perpustakaan untuk memiliki perencanaan bencana tertulis (IFLA, 1999). Pustakawan hanya mengandalkan pengetahuan pribadi dan satuan petugas keamanan terkait penyelamatan. Faktor utamanya adalah karena pustakawan belum memiliki edukasi yang cukup terkait kesiagaan menghadapi bencana. Cukup disayangkan, padahal pustakawan merupakan profesi yang erat dengan pengelolaan informasi dan memiliki peran dalam sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat (Fatmawati, 2020). Pada dasarnya Perpustakaan Kementerian “X” memiliki keinginan untuk mengembangkan pedoman kebencanaan, namun sampai saat ini belum terealisasi. Permasalahan bencana di Perpustakaan Kementerian “X” masih dikesampingkan dan berbagai pengalaman bencana yang ada kurang diapresiasi oleh pihak atasan.

SNI ISO 21110:2019 menyatakan bahwa tim/komite tanggap darurat harus dibentuk untuk bertanggung jawab atas setiap prosedur kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Namun, sejauh ini Perpustakaan Kementerian “X” belum memiliki staf khusus bencana. Perpustakaan hanya mengandalkan satpam maupun petugas teknik pemeliharaan gedung. Meskipun demikian, terdapat dua staf yang tinggal di daerah sekitar perpustakaan sehingga mudah untuk mengetahui situasi perpustakaan secara aktual. Perihal informasi layanan darurat, ditemukan adanya informasi nomor darurat, namun itu sudah sangat lama dan tidak diperbaharui. Salah satu informan menyatakan bahwa saat ini *google* dapat menjadi solusi alternatif. Meskipun demikian, *google* tidak selalu efektif dan efisien karena bergantung kepada berbagai faktor seperti internet dan kemampuan seleksi informasi. Oleh karena itu, sudah seharusnya perpustakaan memiliki

catatan mengenai nomor layanan darurat yang akurat dan *up to date*.

Ketersediaan lokasi alternatif untuk evakuasi barang atau staf ketika terjadi bencana dalam jangka waktu tertentu menjadi aspek penting yang harus dilakukan dalam tahap kesiapsiagaan (Perpustakaan Nasional RI , 2021). Namun, hingga kini Perpustakaan Kementerian “X” belum memilikinya. Pada luar area Gedung Perpustakaan Kementerian “X” juga tidak ditemukan adanya titik kumpul bencana. Selain itu, perpustakaan juga belum menjalin kerjasama dengan pihak perbaikan manapun sehingga dapat mulai diaktifkan. Meskipun demikian, akses transportasi perpustakaan tergolong sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan dekatnya akses dan kelengkapan jenis transportasi seperti taksi, transjakarta, *commuterline*, hingga ojek online maupun ojek pangkalan.

Ditinjau dari kebersihan, Perpustakaan Kementerian “X” terbilang cukup bersih. Hal ini didukung oleh adanya petugas kebersihan dan kerjasama yang baik antara pustakawan dan pengunjung perpustakaan dalam menjaga kebersihan. Meskipun demikian, perpustakaan juga harus memperhatikan kebersihan dari ruang tandon dan gudang. Ditinjau aspek keuangan diketahui bahwa anggaran Perpustakaan Kementerian “X” dapat dinyatakan cukup menyedihkan. Perpustakaan tidak memiliki anggaran untuk perawatan dan pemulihan koleksi, bahkan tahun ini perpustakaan tidak memiliki anggaran sama sekali diakibatkan peralihan wewenang. Padahal keuangan yang memadai sangat dibutuhkan untuk meminimalisir kerugian dan rehabilitasi kerusakan akibat bencana. Alokasi anggaran untuk kebencanaan masih belum efektif dan efisien, pasalnya kemampuan pemerintah dalam melakukan alokasi anggaran bencana di Indonesia diketahui masih cukup terbatas dan jauh dari kebutuhan (Madjid, 2018). Kemudian, karena faktor tersebut juga perpustakaan tidak menggunakan jasa asuransi untuk perpustakaan.

4. *Response* (Tanggapan)

Response atau tanggap darurat merupakan

serangkaian prosedur yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Adapun prosedur yang harus dilakukan adalah upaya peringatan dan penyelamatan (IFLA,1999). Hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan kerusakan lebih lanjut pada koleksi maupun lingkungan perpustakaan. SNI ISO 21110:2019 membagi tanggap darurat menjadi dua komponen yaitu tanggap darurat oleh layanan darurat eksternal (kantor polisi, rumah sakit, dan lainnya) dan tanggap darurat oleh personel internal perpustakaan dengan tindakan dan koordinasi yang tepat. Sejauh ini, tanggap bencana yang melibatkan pihak eksternal di Perpustakaan Kementerian “X” hanya COVID-19. Perpustakaan bekerja sama dengan klinik Kementerian dalam menghadapi COVID-19. Adapun tanggap bencana internal yang dilakukan oleh pustakawan meliputi penerapan WFH-WFO, isolasi mandiri bagi yang terkena COVID-19 (1 orang pustakawan), saling membantu dan berbagi informasi seputar COVID-19. Mereka mengetahui bahwa penting untuk melibatkan layanan tanggap darurat apabila bencana besar terjadi. Sebagaimana pernyataan informan berikut.

“Pertama yang harus dilakukan adalah hubungi security dulu ya. Sekuriti baru laporkan ke biro umum atau ke pihak yang berwenang untuk cepat tanggap.”
(Abimanyu)

Ketika situasi darurat terjadi tidak semua barang dapat diselamatkan untuk itu menentukan prioritas barang yang ingin diselamatkan merupakan tindakan pertama yang harus dilakukan. Selanjutnya, tanggap darurat yang tidak kalah penting adalah melakukan evakuasi atau penyelamatan terhadap barang-barang yang sekiranya dapat diselamatkan ke area evakuasi yang telah ditentukan. Ketika vandalisme terjadi di Perpustakaan Kementerian “X”, tanggap darurat yang dilakukan adalah mengevakuasi koleksi yang rusak. Kemudian, ketika bencana kebocoran dilakukan penyelamatan koleksi yang basah dan segera dikeringkan. Perpustakaan belum memiliki kerja sama

dengan layanan perbaikan khusus seperti *vacuum drying* maupun *freezer local* sehingga hanya dikirim ke fasilitas perbaikan terdekat. Sebelum perbaikan, penilaian awal berupa penilaian tingkat kerusakan harus dilakukan guna mengambil keputusan yang tepat terkait kebutuhan penanganan, pemulihan dan pencegahan kemudian hari (Perpustakaan Nasional RI , 2021). Adapun upaya penilaian awal yang telah dilakukan oleh pihak Perpustakaan Kementerian “X” meliputi dokumentasi, identifikasi dan pencatatan kerusakan sebagai laporan kepada pihak atasan.

5. *Recovery* (Pemulihan)

Recovery merupakan langkah tepat yang dapat diambil perpustakaan sebagai upaya pemulihan terhadap sumber daya perpustakaan seperti lokasi/bangunan fisik dan material yang rusak agar kembali kepada kondisi stabil dan layak digunakan. Tindakan pemulihan bergantung pada pekerjaan konservasi, metode perbaikan dan prakiraan biaya (Perpustakaan Nasional RI , 2021). Hal tersebut karena setiap kerusakan material memiliki tingkat yang berbeda-beda sehingga membutuhkan keahlian dan metode khusus dalam perbaikannya dan terkadang membutuhkan bantuan pihak ketiga seperti ANRI, ahli preservasi dan konservasi, dan lainnya. Lebih lanjut, alokasi anggaran khusus untuk pemulihan juga harus dimiliki oleh perpustakaan karena tak jarang pemulihan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terlebih apabila akibat bencana besar.

IFLA (1999) mengelompokkan kegiatan pemulihan menjadi enam yaitu menentukan daftar prioritas, mengembangkan program konservasi apabila melibatkan materi dalam jumlah besar, memilah barang/koleksi untuk dibuang, diganti, atau dipulihkan dengan metode konservasi khusus, membersihkan dan merehabilitasi tempat kejadian bencana, dan melakukan analisis bencana untuk mengembangkan perencanaan bencana untuk masa depan. Berdasarkan enam kegiatan tersebut, Perpustakaan Kementerian “X” telah melakukan penetapan prioritas perbaikan, pembersihan dan memperbaiki koleksi yang terdampak dan membersihkan dan

merehabilitasi tempat kejadian. Dari bencana yang pernah dialami, kegiatan pemulihan terhadap koleksi yang dilakukan sejauh ini masih cukup sederhana meliputi penjilidan ulang koleksi rusak, mengganti koleksi dengan eksemplar baru, membuat salinan dari eksemplar lain, dan menempel halaman yang rusak atau hilang. Semuanya dilakukan secara mandiri. Hal tersebut karena anggaran pemulihan sangat terbatas. Menurut salah satu informan, anggaran untuk pemeliharaan pada dasarnya sudah terus diajukan, namun stigma perpustakaan yang masih dipandang sebelah mata membuat anggaran tersendat. Seperti halnya ketika perpustakaan mengalami kebocoran luar biasa pada tahun 2013, upaya yang dilakukan oleh perpustakaan hanya menutup rak-rak koleksi dengan kantong plastik hitam, ember dan menutup perpustakaan sementara. Adapun untuk koleksi-koleksi yang basah dikeringkan di teras perpustakaan menggunakan *hair dryer*. Akhirnya karena dirasa kondisi kebocoran cukup parah maka dilakukan renovasi setelah tahun 2013.

Metode pemulihan terhadap kerusakan yang terjadi dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan, pendidikan dan besaran anggaran. Cukup miris mendapati bahwa Perpustakaan Kementerian “X” yang merupakan bagian dari Kementerian di Jakarta tidak memiliki anggaran bencana sehingga usaha kesiagaan menghadapi bencana mulai dari pencegahan hingga pemulihan terhambat. Padahal, perpustakaan tersebut sangat rentan terhadap bencana dan menghimpun koleksi dalam jumlah besar.

Secara umum, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu diketahui bahwa kesiagaan menghadapi bencana Perpustakaan Kementerian “X” di Jakarta memiliki kasus yang tidak jauh berbeda dengan penelitian Rasaki tahun 2019 yang berjudul “Kesiagaan bencana Perpustakaan-perpustakaan Universitas di Nigeria”. Perpustakaan Kementerian “X” di Jakarta diketahui sama-sama belum memiliki atribut penting kesiagaan seperti pedoman, pelatihan staf bencana, anggaran bencana serta mengalami beberapa kejadian bencana, meski tidak sebesar yang dialami oleh beberapa perpustakaan Universitas

Nigeria. Hal tersebut juga sama-sama menjadi permasalahan yang belum teratasi. Padahal atribut tersebut menjadi bagian vital dalam mendukung pelaksanaan kesiagaan menghadapi bencana yang optimal. Oleh karena itu, sudah seharusnya perpustakaan lebih *aware* dalam hal tersebut.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diidentifikasi bahwa Perpustakaan Kementerian “X” telah melakukan kesiagaan menghadapi bencana sesuai IFLA yaitu *risk assessment, prevention, preparedness, response, dan recovery* secara sederhana. Temuan tersebut sudah cukup baik karena hal tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan memiliki prioritas untuk kesiagaan menghadapi bencana. Namun di antara seluruh rangkaian yang telah dilakukan, tahapan analisis risiko merupakan tahap yang masih belum dilakukan secara terstruktur. Hingga saat ini Perpustakaan Kementerian “X” di Jakarta masih belum memiliki catatan atau dokumen tertulis untuk analisis risiko perpustakaan. Temuan selanjutnya yaitu didapati bahwa pemahaman staf Perpustakaan Kementerian “X” di Jakarta mengenai kesiagaan menghadapi bencana sangat terbatas pada informasi umum yang dimiliki. Akibatnya, perpustakaan tidak memiliki kegiatan kesiagaan menghadapi bencana yang optimal. Perpustakaan belum melakukan pelatihan, belum memiliki tim/komite bencana, dan belum memiliki pedoman tertulis. Bahkan anggaran perpustakaan juga terbatas bahkan dikategorikan minim. Meskipun demikian, adanya satuan petugas keamanan yang telah dilatih dalam prosedur dan tanggap bencana juga merupakan sebuah temuan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh beberapa saran yang dapat diberikan guna meningkatkan kualitas kesiagaan menghadapi bencana yakni melakukan kegiatan analisis risiko secara terstruktur dilengkapi dengan catatan tertulis; melengkapi peralatan bencana; membuat pedoman kesiagaan menghadapi bencana khusus perpustakaan; mengadakan pelatihan dan edukasi kebencanaan bagi

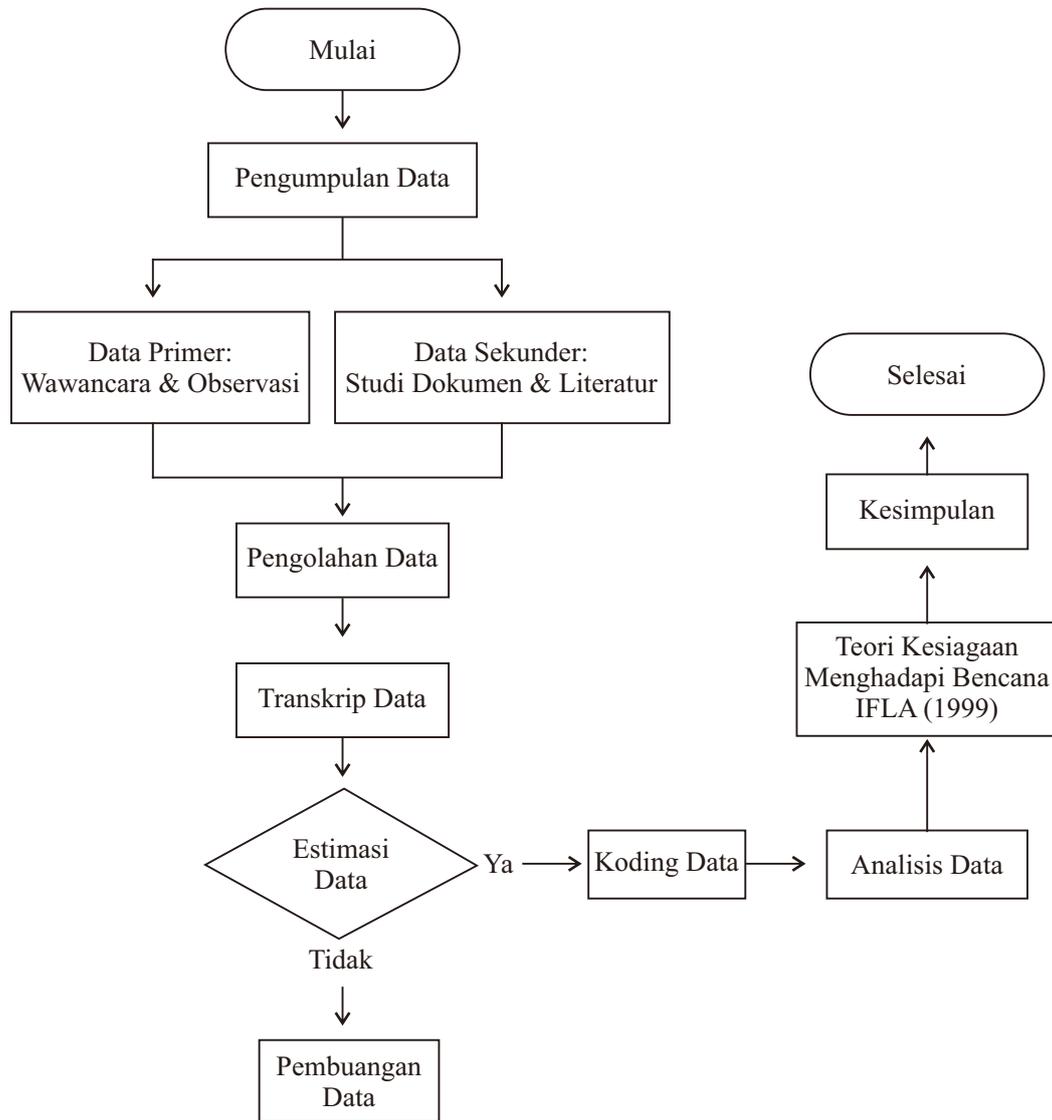
pustakawan; membentuk tim khusus bencana untuk memudahkan proses tanggap darurat; mengidentifikasi koleksi vital perpustakaan; menyediakan ruang/lokasi evakuasi bencana; dan meningkatkan kegiatan perawatan dan pelestarian koleksi dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dan mengadakan anggaran untuk perawatan dan pemulihan koleksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmiyati, U., & Poernomo, N. S. (2019). Penilaian risiko multi bencana di Jakarta, Indonesia. *JUPE : Jurnal Pendidikan M a n d a l a*, 4 (5) , 1 – 6 . <https://doi.org/10.58258/jupe.v4i5.811>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2022, December 17). *Geoportal data bencana Indonesia*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, 5th Edition* (5th edition). SAGE Publications.
- Djamarin, M. (2015). *Faktor penyebab kerusakan bahan pustaka pada Perpustakaan UNP*. UPT Perpustakaan Universitas Negeri Padang.
- Fatmawati, E. (2020). *Modal sosial pustakawan dalam meningkatkan kesadaran manajemen bencana*. Ay Publisher.
- Feather, J. (2016). *Disaster management for libraries and archives* (G. Matthews, Ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315257723>
- Gohain, A., Tariang, B. L., & Saikia, M. (2021). Disaster management in central library, Tezpur University: A study. *Library Philosophy and Practice (e-journal)*, [1–9].
- Haryanto. (2015). Preservasi koleksi grey literature dalam kesiagaan menghadapi bencana di perpustakaan perguruan tinggi. *Jurnal IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia)*, 2(2), 8–20. <https://doi.org/10.1234/jurnal%20ipi.v2i2.22>
- International Federation of Library Associations and Institutions. (1999). *Principles for the care and handling of library material*. IFLA PAC.
- International Federation of Library Associations and Institutions. (2016). *Communication plan (January 2016 – December 2017)*. International Federation of Library Associations and Institutions.
- IQAir. (2022, October 19). *Peta kualitas udara Jakarta*. IQAir. <https://www.iqair.com/id/air-quality-map/indonesia/jakarta>
- K h a m b a l i , I . (2 0 1 7) . *Manajemen penanggulangan bencana*. ANDI.
- Lakoro, R., Sachari, A., Agung, E. B. W., & Sabana, S. (2018). The using of vernacular design to develop educational media for disaster mitigation the direction of disaster mitigation strategies in the ring of fire region. *Proceeding of International Conference on Art, Language, and Culture*, 57–62.
- Laksmiwati, I. (2019). *Kesiagaan pustakawan dalam menghadapi bencana (Disaster Planning) di Perpustakaan Institut Seni Indonesia Surakarta*.
- Madjid, N. C. (2018). Analisis metode penghitungan dan alokasi anggaran bencana alam. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 1046–1065.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI Nomor 11 Tahun 2011, Pub. L. No. Nomor 11 Tahun 2011, Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI (2011).
- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017, Nomor 14 Tahun 2017 (2017). <https://peraturan.go.id/id/perpusnas-no-14-tahun-2017>
- Perpustakaan Nasional RI (2021). *Standar Nasional Indonesia informasi dan dokumentasi kesiapsiagaan dan tanggap darurat in SNI ISO 21110:2019 IDT information and documentation-emergency preparedness and response*.
- Pitri, N. (2019). Kesiapsiagaan perpustakaan dalam menghadapi bencana kebakaran di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. *Baitul Ulum: Jurnal Ilmu*

- Perpustakaan*, 3(1), 18–32.
- Rachman, Y. B., & Rachman, M. A. (2015). *Disaster preparedness at archive office sub-district Depok city*. *Jurnal Kearsipan*, 10(1), 89–106.
- Rasaki, O. E. (2019). Disaster management practices in selected university libraries in Nigeria. *Journal of the Institute of Conservation*, 42(2), 151–167. <https://doi.org/10.1080/19455224.2019.1604395>
- Riyanti, A. (2017). *Kebijakan pengembangan perpustakaan khusus*. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Setiawan, S., & Mas'ud, A. (2019). Membangun institusional repository perpustakaan perguruan tinggi (Studi pada Perpustakaan Universitas Negeri Malang). *Bibliotika : Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi*, 3(1), 47–55. <https://doi.org/10.17977/um008v3i12019p047>
- Tan, Q., Li, J., & Zeng, X. (2015). Rare earth elements recovery from waste fluorescent lamps: A review. *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*, 45(7), 749–776. <https://doi.org/10.1080/10643389.2014.900240>
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pub. L. No. 24 Tahun 2007, Jakarta (2007). <https://www.bnppb.go.id/storage/app/media/uploads/migration/pubs/1.pdf>
- Wanto, A. H. (2018). Strategi pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis konsep *smart city*. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 39–43. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43>
- Wijayasundara, N. D. (2021). Disaster preparedness in Sri Lanka university libraries: Before COVID-19. *Journal of the Australian Library and Information Association*, 70(3), 246–262. <https://doi.org/10.1080/24750158.2021.1955319>

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1. Flowchart Metode Penelitian Kesiagaan Menghadapi Bencana di Perpustakaan Kementerian “X” di Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Perpustakaan Kementerian "X" di Jakarta

No.	Nama	Jabatan
1.	Abimanyu	Pengelolaan Perpustakaan
2.	Dewi Srikandi	Pustakawan bagian Pengolahan Audio Visual
3.	Antasena	Pustakawan bagian Pengolahan Majalah
4.	Dewi Sinta	Pustakawan bagian Pengadaan
5.	Arjuna	Pustakawan bagian Pengolahan Monograf
6.	Dewi Gandawati	Pustakawan bagian Pengolahan Monograf
7.	Dewi Sumbadra	Pustakawan Pengolahan Monograf

Sumber: Data primer diolah, tahun 2022

Tabel 2. Data Hasil Identifikasi Bencana yang Dialami Perpustakaan Kementerian "X" di Jakarta

Jenis Bencana	Bentuk Bencana	Sebab - Akibat
Alam	Atap Ambruk	Hujan lebat terus-menerus menyebabkan atap lapuk dan ambruk sehingga beberapa koleksi terdampak.
Manusia	Gempa Bumi	Gempa Skala Kecil dan tidak ada dampak.
	Vandalisme	Mencoret-coret, merobek dan hilangnya koleksi.
	Kelalaian Staf	Lupa meletakkan koleksi sehingga koleksi tidak ditemukan.
Sistem/Teknologi	Atap Berlubang dan Bocor	Konstruksi atap bangunan yang kurang baik. Atap berlubang sehingga mengalami kebocoran di sebagian besar perpustakaan dan menjadi jalur tikus.
	Komputer mengalami <i>system crash</i>	Pembekuan sistem pada komputer akibat kedinginan. Akibatnya beberapa data perpustakaan hilang.
	Mati Lampu	Aktivitas terhenti sejenak.
	Talang Air Bocor	Talang air tersumbat sampah dan ketika hujan besar jebol.

Sumber: Data primer diolah, tahun 2022

Tabel 3. Hasil Identifikasi Koleksi Perpustakaan Kementerian "X" di Jakarta yang Terancam Bahaya

Jenis Koleksi	Ancaman	Perlakuan Terhadap Koleksi
Tua/Reprografi/Langka (sebelum tahun 1961)	Material koleksi rapuh karena sudah sangat tua.	Disimpan bersama koleksi lainnya dan dapat diakses secara bebas. Beberapa koleksi di antaranya ada yang tidak disampul karena rapuh takut merusak koleksi, bolong-bolong karena kutu buku dan rayap, serta belum di alih mediakan.
Peta	Material koleksi rapuh karena sudah sangat tua.	Disimpan di dalam lemari khusus dengan suhu ruang yang rendah, belum di alih mediakan.
Mikrofis	Alat pembacanya terbatas.	Disimpan di ruang koleksi khusus di dalam sebuah amplop. Alat pembacanya saat ini hanya tersisa satu buah.

Sumber: Data primer diolah, tahun 2022